

ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana proses penerapan kebijakan Program Kebun Bibit Rakyat Kabupaten Gresik. Permasalahan di dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut tentang gambaran proses pelaksanaan kebijakan Program Kebun Bibit Rakyat Kabupaten Gresik, apakah sudah sesuai dengan pedoman teknis dari penyelenggaraan program KBR yang di laksanakan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah di KBR (Kebun Bibit Rakyat) Kabupaten Gresik . Teknik pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling* (informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan metode triangulasi.

Banyaknya lahan kritis, lahan yang kurang produktif, dan kondisi DAS yang parah menjadi latar belakang dalam kebijakan program KBR di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan program KBR di Kabupaten Gresik yang berdasar pada Permen Kehutanan RI Nomor P. 23/ Menhut-II/2011 dijelaskan tentang pedoman teknis KBR dengan alasan pelaksanaan KBR yang tertuang dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya, kelestariannya, dan diurus dengan baik, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2004.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan program KBR dianalisis berdasarkan lima variabel yakni: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya (manusia, finansial, dan alam), karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Sehingga diperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan program KBR dalam upaya pemulihan lahan kritis dan DAS (Daerah Aliran Sungai) di Kabupaten Gresik.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Lahan Kritis, DAS (Daerah Aliran Sungai)